

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 139 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG TIM  
ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pimpinan Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu penyempurnaan terhadap daftar nama Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 97 Tahun 2020 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 97 Tahun 2020 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR  
97 TAHUN 2020 TENTANG TIM  
ASESOR PENILAIAN MANDIRI  
PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 139 TAHUN 2020

TANGGAL : 12 JUNI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR  
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

<b>Kedudukan dalam Tim</b>		<b>Nama</b>	<b>Honorarium (Rp)</b>
Penanggung Jawab		: Roni Dwi Susanto	450.000
Ketua		: Hermawan	400.000
Anggota			
1.	Asesor untuk Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	: Andy Martanto	300.000
2.	Asesor untuk Biro Umum dan Keuangan	: Angga Widita Amirul	300.000
3.	Asesor untuk Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	: Resa Anggriani	300.000
4.	Asesor untuk Inspektorat	: Jochanan Setyo Adhi Nugroho	300.000
5.	Asesor untuk Pusdiklat	: Tri Tarwoco	300.000
6.	Asesor untuk Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	: Deasy Rachmawati	300.000



7.	Asesor untuk Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus	:	Ermawati Septianingtyas	300.000
8.	Asesor untuk Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	:	Thanthawi Jauhari	300.000
9.	Asesor untuk Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	:	Hilman Fazri	300.000
10.	Asesor untuk Direktorat Pengembangan Katalog	:	Aloysius Sigit Wicaksono	300.000
11.	Asesor untuk Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	:	Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	300.000
12.	Asesor untuk Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	:	Dian Rahmayanti	300.000
13.	Asesor untuk Direktorat Sertifikasi Profesi	:	Rovazio Okiiza	300.000
14.	Asesor untuk Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	:	Imam Arumsyah	300.000
15.	Asesor untuk Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	:	Mita Astari Yatnanti	300.000
16.	Asesor untuk Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	:	Mirna Medita Endikasari	300.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO